

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baba, Mastang Ambo, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Bonsu, Benny, *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*. Jakarta: Mediatama Saptakarya, 1997.
- Eckert, Joseph K., *Property Appraisal and Assessment Administration*, Chicago Illionis: IAAO, 1990.
- Fajar, Mukti N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Fitriana, Yulia Rahma, et al. *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Ismail, Nurhasan, *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2024.
- Napitupulu, Diana R. W. *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*. Jakarta: UKI Press, 2022.
- Nurhaini, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Santoso, Marcella, *Legalitas dan Legitimasi Surat Keterangan Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.

Setiabudi, Jayadi, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah serta Segala Perizinannya*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

_____,
Sudjito, *Prona: Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Masalah Tanah yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV Alfabeta, 2016.

Sumardjono, Maria S.W., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

_____, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Suparman, Ujang, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Swasono, Sri Edi. *Kependudukan, Kolonisasi, Dan Transmigrasi*, *Transmigrasi Di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: UI Press, 1986.

2017, Tim Peneliti Strategis, *Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah, dan Konflik*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5804).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1036).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 802).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 953).

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 22).

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 25).

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, 3 Maret 2023.

C. Jurnal

- Ardiansyah, “Implikasi Hukum Penghapusan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* 2, No. 1, (Desember: 2024): 1-36
<https://doi.org/10.55292/ycb62s96>.
- Atikah, Noor, ‘Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia’, *Notary Law Jurnal* 1, No. 3 (April 2022): 263-289
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>
- Desi, Apriani, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5 No. 2, (Maret 2021):220-239,
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Dewi, Ninda Puspita dan Fifiana Wisnaeni, “Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Cirebon”, *Notarius* 16, No. 2 (Agustus 2023): 1070-1081, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42375>
- Fahrozi, Nour, “Analisis Pembinaan Transmigran Studi Kasus Desa Transmigrasi Pelabai Kabupaten Lebong”, *Jurnal STIA Bengkulu: Committee to Administration for Education Quality* 1, No. 1 (Januari 2022): 45-55, <https://doi.org/10.56135/jsb.v8i1.23>.
- Kurniawan, Wahyu Andi, Setiowati, Theresia Supriyanti, “Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat”, *Jurnal Tunas Agraria* 1, No. 1 (September 2018): 1-19, <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1>.
- Masriani, Yulies Tiena, “Pentingnya Sertipikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak”, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 (April 2022): 539-552 <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Masnah, et. all., “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Renaissance*, No. 2 (Agustus 2021): 783-801 <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.
- Mujiburohman, Dian Aries, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, No. 1 (Februari 2021): 88-101, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

Nebi, Oktir, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi" 1, *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, No. 3 (September: 2024): hlm. 206-217
<https://doi.org/10.62383/parlemerter.v1i3.121>.

Rahmanto, Adi, et al., "Perlindungan Hak Tanah untuk Keberlanjutan Agribisnis: Peran Pendaftaran Tanah dalam Mengamankan Aset Pertanian", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 1, (Januari 2025): hlm: 89-99, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.425>

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan dan Raka Devara Putra Wicaksana, "Eksistensi Dan Pembuktian Hukum Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Sebagai Aset Perusahaan Pertambangan", *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 10 (Agustus 2023): 2370-2385, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p11>.

Shandora, Rika, "Analisis Yuridis Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas Pemberian Tanah Secara *Panjean* pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Desa Sibolahotang SAS dan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba)", *Jurnal Kajian Hukum: Iuris Studia* 2, Nomor 3 (Oktober 2021) 624-633,
<https://doi.org/10.55357/is.v2i3.184>.

Tanikwele, Nathalia, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Erick Stenly Holle, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah bagi Transmigran di Kabupaten Maluku Tengah", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 6 (Agustus 2023): 603-614,
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1820>.

Verawati, Raras, *et.al*, "Kewenangan dan Peran Peraturan Daerah dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (Desember 2020): 1109-1121,
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1146/726>

Wardoyo, Heru, "Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Tanah di Indonesia", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 1 (Januari 2024): 119-129,
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4714>.

D. Internet

Heru, Raden. "Inilah Manfaat PTSL Bagi Masyarakat dan Pemda", *Mediacenter Riau*, 27 Januari 2022.
<https://mediacenter.riau.go.id/read/68391/inilah-manfaat-pts-l-bagi-masyarakat-dan-pemda.html> (diakses 3 Februari 2025).

Humas. “Masih Ada Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi Dengan Kawasan Hutan. Kadis Nakertrans: “Harus Ada Solusi””. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/masih-ada-tumpang-tindih-lahan-transmigrasi-dengan-kawasan-hutan-kadis-nakertrans-harus-ada-solusi/> (diakses 3 Februari 2025).

Kabinet, Humas Sekreariat, “Presiden Jokowi Serahkan 1 Juta Sertipikat Tanah Untuk Rakyat”. <https://setkab.go.id/presiden-targetkan-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertipikat-pada-2025/> (diakses 3 Februari 2025).

Rahayu, Riri. “129 Ribu Transmigran Tidak Memiliki Sertipikat Hak Milik”, Tempo, 25 Maret 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/129-ribu-transmigran-tidak-memiliki-Sertipikat-hak-milik-1223847#google_vignette (diakses pada 17 Mei 2025).

Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kata Daftar”, diakses laman <https://kbbi.web.id/daftar> (diakses pada Sabtu, 21 Maret 2025).

E. Tesis

Halimah, Siti, “Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

P, Ayu Dika Febriyani, “Implementasi Pendaftaran Tanah Terhadap Penguasaan Tanah Restan (SISA) oleh Masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2024.

Sholikhudin, Muhammad, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang, 2021.